



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 06 April 2021

Halaman: 2

Dorong Bentuk Pansus Kredit Fiktif

HS Sebut Kasus Bank Jogja Adalah Penipuan

JOGJA, Radar Jogja - Anggota DPRD Kota Jogja mewacanakan pembentukan pansus dalam kasus dugaan korupsi kredit fiktif di BPR Bank Jogja. Di antaranya untuk menelusuri proses pencairan kredit senilai Rp 27,4 miliar tersebut. Termasuk fungsi Komisaris dan Dewan Pengawas Bank Jogja. Anggota DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro mengatakan, kasus dugaan korupsi kredit fiktif Rp 27,4 miliar tersebut perlu diperjelas proses pencairannya. Apalagi diduga melibatkan banyak kreditur fiktif. "Cara kerjanya (Bank Jogja) ngawur," katanya dalam agenda diskusi Fenomena Kredit Fiktif Bank Pelar Merah kemarin (5/4). Mantan Advokat itu menjelaskan dalam proses administrasi kredit bank memiliki mekanisme tertentu. Saat hendak mengajukan kredit dengan

nominal tertentu sudah ada yang bertanggung jawab. Seperti kredit analisis, areal manager, hingga dengan nominal angka besar langsung menjadi kebijakan pusat. Terlebih, pencairan kredit mencapai Rp 27,4 miliar oleh Bank Jogja. Menurut dia, nominal sebesar itu tidak bisa langsung diputuskan untuk bisa mencairkan kredit hanya dari seorang Kepala Cabang atau kredit analisis sekalipun. Selain mekanisme harus tanda tangan survei, lingkungan apakah layak diberikan atau tidak, dan lain-lain. "Jelas ini menyakiti warga Jogja yang jadi nasabah," ujarnya. Sekretaris DPC PDI-P Kota Jogja itu, menambahkan pengajuan pembentukan pansus itu juga ingin mengetahui lebih jauh soal peran dan tanggung jawab dewan pengawas. Diklaim, dalam kasus ini terdapat kemungkinan dewan pengawas telah lalai dan teledor menjalankan tugas serra fungsinya. Padahal, jelas katanya ada regulasi tentang membuat MOU antarpihak. Sementara, pun yang bertanda tangan

dari pihak Transvision ialah bukan orang yang memiliki kewenangan melakukan MOU terhadap perkreditan. Info yang diterimanya, kreditur tidak hanya warga Jogja ternyata, tapi juga Wonosobo, Boyolali. "Bahkan ada (profesinya) pengangguran dan pengemis-bala kambing diseragami, dikasih id card, lalu slip gaji. Kredit Rp10 juta, tapi cuma dikasih Rp1 juta, yang Rp 9 juta enggak tahu untuk siapa," jelasnya. Sementara itu, Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba juga menyoroti proses pencairan kredit. Yang patut diduga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Terlebih ada temuan fakta bahwa terdapat modus pemalsuan identitas dalam dugaan aliran kredit fiktif tersebut. Dari ratusan karyawan tidak semuanya sebagai penerima kredit, melainkan menggunakan nama-nama palsu. "Hal seperti itu kenapa bisa lolos. Sebagai masyarakat umum mengajukan kredit harus ada syarat-syarat terpenuhi seperti diketahui suami istri, disurvei tempatnya,

tidak *ujug-ujug* dicairkan," katanya. Dia juga mendorong memaksimalkan fungsi dan peran dewan pengawas maupun kalangan DPRD Kota. Agar kasus serupa tidak terulang dan menerima kembali bank-bank plat merah kemudian hari. Selain bank plat merah yang dihimbau harus berhati-hati BPR swasta pun juga demikian wajib mengedepankan unsur kehati-hatian. "Jangan mudah memberikan kredit dengan jumlah yang sangat besar bermodal foto-foto KTP dan foto-foto hanya menggunakan baju seragam yang berganti-ganti," pesannya. Terpisah Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti mengakui bahwa kasus yang menimpa Bank Jogja merupakan penipuan terhadap bank bukan kredit fiktif. Sebab, jika kredit fiktif kasusnya adalah kredit tidak ada namun diakui ada. Tetapi, dalam kasus ini kreditnya ada. "Nomenklatur kredit fiktif itu tidak benar, kreditnya ini ada kok. Cuma ditipu orang, jadi *clear* itu penipuan terhadap bank," katanya. (wia/pr/fi)

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Sifat	Tindak Lanjut
Seegera	☐ Untuk Ditanggapi
	☐ Untuk Diketahui
	☐ Jumpa Pers
Yogyakarta, Kepala	
Ttd	
Ig. Trihastono, S.Sos, MM NIP. 19690723 199603 1 005	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Seegera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005